



Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tenggara

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Joko Tri Brata ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 3, Desember 2023
joko_tribrata@yahoo.co.id <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Catur Sugiarti
Universitas Pembangunan Indonesia, Yogyakarta
caturkataud@gmail.com

Rahmisyari
Universitas Ichsan Gorontalo
Persadalestari01@gmail.com

Asri Djauhar
Universitas Sulawesi Tenggara
asridjauhar@gmail.com

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Brata, J. T., Sugiarti, C., Rahmisyari., & Djauhar, A. (2023). Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3 (3), 188-199.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan Pariwisata di Propinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen perencanaan daerah baik di Sulawesi Tenggara maupun daerah banding lainnya dan pendalaman dengan pengelola kebijakan pariwisata dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan pariwisata selalu bertumpu pada perencanaan yang menegaskan potensi pada setiap wilayah, dan selalu mengoptimalkan peran lembaga pengelola baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga yang mengusahakan industri pariwisata. Saran yang disampaikan adalah semua elemen pengelola perlu melakukan inovasi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan usaha wisata

Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata, Pengelolaan, Komoditas

Abstract

The aim of this research is to determine the overview of tourism management in Southeast Sulawesi Province. The data used is secondary data obtained from the results of a review of several regional planning documents both in Southeast Sulawesi and other comparative regions and in-depth research with tourism policy managers and analyzed using qualitative descriptive and SWOT analysis. The research results illustrate that tourism management always relies on planning that emphasizes the potential of each region, and always optimizes the role of management institutions, both government institutions and institutions that manage the tourism industry. The suggestion given is that all management elements need to make significant innovations in efforts to improve the quality of tourism business management

Keywords: Tourism Policy, Management, commodity.

A. Pendahuluan

Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam konteks itulah, maka pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 2008). Pariwisata dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000). Sedangkan, menurut Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2004). Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.

Pembangunan Kepariwisata di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata ini sudah tentu mempunyai kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya. Apabila dilihat dari segi ekonomi bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berupa pajak, retribusi dan sumber Devisa bagi Negara. Disamping itu Industri Pariwisata sebagai Industri padat karya akan membuka lapangan kerja yang begitu besar bagi penduduk dimana obyek wisata itu berada, sekaligus akan membuka peluang bagi Home Industri bagi masyarakat sekitar dalam bentuk karya seni kerajinan tangan, Souvenir, Snack khas daerah, jasa Guide, Jasa transportasi darat dan laut, Restaurant dll. Yang akan menambah pendapatan bagi masyarakat setempat.

Kebijakan dan Kebijakan Publik

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yang mengutip Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Banyaknya pakar mengemukakan definisi tentang kebijakan tidak mempersulit untuk mengambil benang merah pengertian kebijakan. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu: (1) Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*); (2) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek; (3) Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan; dan (4) Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Dalam konteks Kebijakan Publik, dengan menekankan pada tindakan pemerintah yang oleh Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan."

Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yang mengemukakan Kebijakan publik sebagai "apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah."

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menelaah beberapa dokumen yang terkait pengelolaan pariwisata, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk dokumen perencanaan dan beberapa dokumen pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata dan pendalaman melalui wawancara pada key informasion, , dengan analisis melalui analisa deskriptif kualitatif.

Untuk strategi pengembangan pariwisata, dilakukan dengan menggunakan analisi SWOT yang berguna untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan pariwisata.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Telaah Dokumen

Hasil telaah dokumen potensi wisata yang diperoleh dari master Plan Komoditas unggulan Sulawesi Tenggara, menggambarkan potensi wisata di Kabupaten Kota Sulawsi Tenggara seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1. Potensi Pariwisata Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/Kota	Wisata Alam Wilayah Perairan Laut	Wisata Alam Wilayah Daratan	Wisata Sejarah dan Budaya
1.	Wakatobi	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Moli'i Sahatu, ☐ Pantai Sousu, ☐ Pantai Waha, ☐ Pantai Moli Sahatu, ☐ Pantai Jodoh, ☐ Pantai Liya Honiki, ☐ Pantai Usuno, ☐ Matahora Beach, ☐ Pantai One Meha 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Goa Lia Ntade, ☐ Goa Alam, ☐ Sumanga Island, Kompo Nuone Island, ☐ Air Gua Kontamale, ☐ Air Gua Tee Kosapi, Panorama Puncak Waginopo, ☐ Telaga Gua 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Benteng Liya Togo, ☐ Benteng Tindoi, ☐ Banteng Wabue-Bue, ☐ Benteng Koba, ☐ Benteng Watinti, ☐ Benteng Mandati Tonga, ☐ Benteng Togo Molengo (Kapota), ☐ Benteng Baluara (Kapota), ☐ Situs Kuburan Tua Tindoi, ☐ Benteng Pangilia, ☐ Benteng Ollo, ☐ Benteng La Donda, ☐ Benteng Horuo, ☐ Benteng La Manungkira, ☐ Benteng La Bohasi, ☐ Benteng Tapa'a, ☐ Situs Masjid Tua Kampung Bente, ☐ Rumah Adat Bontona Kaledupa, ☐ Makam Bontona Kaledupa, ☐ Benteng Patua, ☐ Benteng Suo-Suo, ☐ Benteng Rambi Randa, ☐ Situs Makam Ince Sulaiman, ☐ Masjid Tua, ☐ Benteng Fatiwa, ☐ Benteng Oihu, ☐ Benteng Wali, ☐ Benteng Palahidu, ☐ Benteng Baluara, ☐ Benteng Haka, ☐ Benteng Tadu Taipabu, dan ☐ Kapal Vatampina (Batu Menyerupai Kapal)
2.	Kota Kendari	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Toronipa, ☐ Pantai Nambo, ☐ Pantai Mayaria, dan ☐ Wisata Teluk Kendari 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Lahundape, ☐ Agrowisata Nanga- Nanga 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Situs Makam Raja Sao-Sao, ☐ Situs Bunker, dan ☐ Terowongan Jepang

No.	Kabupaten/Kota	Wisata Alam Wilayah Perairan Laut	Wisata Alam Wilayah Daratan	Wisata Sejarah dan Budaya
3.	Kota Baubau	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Nirwana, ☐ Pantai Lakeba, ☐ Pantai Kokalukuna dan ☐ Perairan Laut Pulau Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Tirta Rimba, ☐ Air Terjun Samparona, ☐ Air Terjun Lagaguna, ☐ Air Terjun Kantongara, ☐ Permandian Alam Bungi, ☐ Gua Lakasa, ☐ Gua Ntiti, ☐ Gua Kaisabu, ☐ Bukit Palatiga, dan ☐ Kali Baubau 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Kawasan Kompleks Keraton Kesultanan Buton, ☐ Situs Kamali Malige, ☐ Situs Benteng Kalampa, ☐ Benteng Sorawolio, dan ☐ Istana Ilmiah
4.	Buton	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Jodoh, ☐ Pantai Katembe, ☐ Pantai Posuncui, ☐ Pantai Kasosona, ☐ Pantai Kancinaa, ☐ Pantai Hulu Wakoko, ☐ Pantai Topawabula, ☐ Pantai Banabungi, ☐ Pantai Pasir Banabungi, ☐ Pantai Sukoa, dan ☐ Pantai Sangia Waode 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Panas Warede- Rede, ☐ Air Panas Kaongkeongkea, ☐ Permandian Benteng Takimpo, ☐ Permandian Winto, ☐ Permandian Goa Lakaedu, ☐ Permandian Goa Katukotobari, ☐ Permandian Goa Watorumbe, ☐ Permandian Uncume 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Benteng Takimpo, ☐ Benteng Kombeli, ☐ Benteng Bombonawulu, ☐ Benteng Lapandewa, ☐ Benteng Lasalimu, ☐ Benteng Wabula, ☐ Benteng Liwu, ☐ Situs Makam Oputa Yii Koo, ☐ Makam Sangia Wambulu, ☐ Makam Majapahit, ☐ Mesjid Tua Wawoangi, dan ☐ Situs Gua Waode Pogo
5	Muna	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perairan Laut Selat Tiworo, 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permandian Danau Napabale, 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Gua Liang Kobori,
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pulau Munante dan ☐ Pantai Pasir Putih Walengkabola 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permandian Mata Air Kamonu, ☐ Permandian Mata Air Fotumo Rete, ☐ Permandian Mata Air Jompi, dan ☐ Danau Motonuna 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Mesjid Tua Muna, ☐ Benteng Tiworo, ☐ Benteng Yaro Wadolau, ☐ Benteng Wasidakari, ☐ Makam Waode Kamomokamba, ☐ Makam Sugi Manuru, ☐ Makam Patani, ☐ Makam Ambona ☐ Makam Sugi Palola, ☐ Benteng Kota Kontu Kowuna
6	Kolaka	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Poturua, dan ☐ Pantai Malaha 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove, ☐ Permandian Air Panas Mangolo, ☐ Permandian Alam Tamborasi, dan ☐ Permandian Tanjung Kayu Angin 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Makam Sangia Nibandera, ☐ Kompleks Makam Raja-Raja Mekongga, ☐ Situs Tambang Nikel Peninggalan Jepang, ☐ Benteng Kerajaan Mekongga, ☐ Situs Gua Watu Wulaa Silea, dan ☐ Situs Makam Bokeo Latambaga

No.	Kabupaten/Kota	Wisata Alam Wilayah Perairan Laut	Wisata Alam Wilayah Daratan	Wisata Sejarah dan Budaya
7	Konawe Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pulau Hari, ☐ Pulau Lara, ☐ Pantai Polewali, ☐ Pantai Torobulu, ☐ Teluk Kolono, dan ☐ Pantai Pasir Putih Moramo Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Moramo, ☐ Air Terjun Labuan Beropa, ☐ Air Terjun Laeya, ☐ Air Terjun Baito, ☐ Air Terjun Ranomeeto Barat, ☐ Air Terjun Gunung Teo, ☐ Air Terjun Wolasi, ☐ Air Panas Kaindi, ☐ Air Panas Lainea, ☐ Air Panas Lamokula, • Air Panas Amohola, • Air Panas Sungai Roda, • Wisata Alam Pegunungan Popalia, • Gua Kelelawar, • Wisata Pemancingan Ala Sungai Konaweha, • Agrowisata • Perkebunan dan Rencana Ekowisata 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Makam Raja Silondae, ☐ Makam Pejuang Lamarota, ☐ Makam Pejuang Laulewulu, ☐ Makam Pejuang Lapadi, ☐ Makam Pejuang Tongasa, ☐ Makam Pejuang Polingai, ☐ Makam Pejuang Tawulo, ☐ Makam Pejuang Lababa, ☐ Benteng Lapadi, dan ☐ Situs Goa Jepang
8	Kolaka Utara	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Tanjung Tolala, ☐ Pantai Tanjung Tobaku, ☐ Pantai Pasir Putih Batutoru, ☐ Pantai Pasir Putih Lelewawo, ☐ Pantai Pasir Putih Pakue, dan ☐ Pantai Pasir Putih Tolitoli 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Danau Biru / Matandahi, ☐ danau Rantebaru, ☐ Air Terjun Sarambu, ☐ Air Terjun Batu Tedong, ☐ Air Terjun Lapasi-pasi, ☐ Pegunungan Mekongga, ☐ Goa Lelewao, ☐ Goa Arupe, ☐ Goa Tinende, ☐ Goa Wolatu, ☐ Goa Ngapa, ☐ Goa Watune, ☐ Goa Watuliu, ☐ Goa Pasonggi, ☐ Goa Kodeoha, ☐ Goa Kumapo Kodeoha, ☐ Goa Katoi, ☐ Goa Datu, dan ☐ Goa Sarambu 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Goa Tengkorak Lawolatu, dan ☐ Situs Goa Lametusa
9	Konawe	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Bokori, ☐ Pantai Toronipa, ☐ Pantai Batugong dan ☐ Gugusan Pulau- Pulau (Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda Darat, dan Pulau Saponda Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Larowiu, ☐ Air Terjun Anawai, ☐ Air Terjun Kumapodahu (Anggaber), dan ☐ Air Terjun Rukuo 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Rumah Besar Adat Suku Tolaki, dan ☐ Makam Raja Lakidende Unaaha

No.	Kabupaten/Kota	Wisata Alam Wilayah Perairan Laut	Wisata Alam Wilayah Daratan	Wisata Sejarah dan Budaya
10	Bombana	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pulau Sagori, ☐ Pulau Masudu, ☐ Pulau Bakau, ☐ Pantai Pajongae, ☐ Pulau Motaha, ☐ Pulau Basa, dan ☐ Pulau Mangata Malangke 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Ee Meloro, ☐ Air Terjun Ulungkara, ☐ Air Terjun Sangkona, ☐ Air Panas Larete, ☐ Gunung Watu Sangia, ☐ Purano, ☐ Goa Watu Buri, ☐ Pantai Tapuahi, ☐ Permandian Tahite, ☐ Danau Ponu-Ponu, ☐ Wisata Alam Gunung Tangkeno 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Situs Bunker Jepang Pajongaea, ☐ Makam Raja Sangia Dowo, ☐ Makam Raja Tongki Pu'u Wonua, ☐ Makam Pandita, ☐ Makam Sangia Pewua'a, ☐ Rumah Adat Mornene/Rahawatu, ☐ Tugu Pahlawan, ☐ Kapal Karam VOC, ☐ Benteng Tuntuntari, ☐ Benteng Watuwui, ☐ Benteng Tirongkotua, ☐ Benteng Tangkeno, ☐ Benteng Wasauri, ☐ Situs Goa Watuburi
11	Konawe Utara	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perairan Laut Lasolo ☐ Pantai Panggulawu, ☐ Pantai Matanggonawe, ☐ Pantai Tanjung Taipa, ☐ Pantai Lameruru, ☐ Pantai Molore, ☐ Pantai Tondowatu Mataiwoi 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Tikumeopu - Opua, ☐ Air Terjun Boenaga, ☐ Air Terjun Matapila, ☐ Air Terjun Larowiu, ☐ Air Terjun Morende- Rende, ☐ Air Panas Wawolesea, ☐ Air Terjun Tetewatu, ☐ Telaga Tiga Danau Walasolo, ☐ Danau Tiga Warna, ☐ Gua Kelelawar, ☐ Goa Wawontoaho ☐ Wisata Satwa Kupu-Kupu 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Goa Solooti ☐ Goa Tengkorak
12	Buton Utara	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pantai Membuku, ☐ Pantai Bonelipu, ☐ Wisata Mangrove Teluk Kulisusu ☐ Wisata Bahari Kecamatan Kulisusu dan Wakorumba Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Mata Air Pasarambo Laea, ☐ Mata Air Eengkapala, ☐ Mata Air Eenunu, ☐ Mata Air Eemoloku, ☐ Mata Air Cinariene, ☐ Air Terjun Latambora, ☐ Permandian Matantahi, ☐ Air Panas dan Gua Alam 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Benteng Bangkudu, ☐ Benteng Lipu, ☐ Benteng Pangilia, ☐ Benteng Gantara, ☐ Benteng Baluara, ☐ Benteng Koburotono, ☐ Benteng Doule ☐ Situs Mesjid Keraton Lipu
13	Kolaka Timur		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Air Terjun Tongauna, ☐ Puncak Wesalo ☐ Taman Wisata Batu Lukis 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Gua Istana Porabua, ☐ Batu Tapak Mowewe ☐ Makam Bokeo Bula

Sumber Data : Master Plan Komoditas Unggulan Sultra, 2023.

Tabel 2. Wisata Alam Sebagai Kawasan Lindung di Sulawesi Tenggara

No.	Wisata Alam Sebagai Kawasan Lindung	Letak
1.	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur
2.	Taman nasional Komplek Pegunungan Mekongga	Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur
3.	Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi	Wilayah Perairan Kabupaten Wakatobi
4.	Taman Wisata Alam Mangolo	Kabupaten Kolaka
5.	Taman Wisata Alam Tirta Rimba	Kota Baubau
6.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang	Kabupaten Kolaka
7.	Taman Wisata Alam Laut Tiworo	Kabupaten Muna
8.	Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi	Kabupaten Buton
9.	Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo	Kabupaten Konawe Utara
10.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Sagori	Kabupaten Bombana

Sumber Data ; Master Plan Komoditas Unggulan Sultra, 2022

Salah satu contoh destinasi wisata yang menjadi andalan Sulawesi Tenggara adalah Pulau Wakatobi. Atraksi sebagai poin utama pendorong pariwisata terjadi di Wakatobi. Berada dalam segitiga terumbu karang dunia, keindahan bawah laut Wakatobi tidak perlu lagi diragukan. Beragam jenis terumbu karang dan biota laut dapat ditemukan dengan mudah saat melakukan beragam aktivitas seperti snorkeling dan diving. Menyadari bahwa memiliki potensi yang mendukung untuk pengembangan pariwisata, pemerintah pun tidak melepaskan kesempatan itu. Promosi secara gencar dilakukan untuk “menjual” di seluruh dunia. Namun promosi dilakukan tidak hanya untuk keindahan bawah laut Wakatobi. Berbagai destinasi Berbagai destinasi wisata lainnya dan beragam budaya yang dimiliki turut dipromosikan sebagai alternatif kegiatan bagi para wisatawan untuk menghindari terjadinya kejenuhan.

Pembahasan Penelitian

Hasil Telaah dalam RPJMD 2018-2023 Propinsi Sulawesi Tenggara mengemukakan bahwa dalam konteks Geo strategis, Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Dalam konteks itulah Propinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.

Kalau kita membandingkan dengan Pengembangan pariwisata di Yogyakarta, Yulia Rimapradesi (2022), dalam suatu tulisan Strategi Kebijakan Pariwisata Pemerintah D.I. Yogyakarta di Era New Normal, yang termuat dalam Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 1 (2022), pp.16-27, Menyebutkan pemulihan ekonomi pariwisata Yogyakarta membutuhkan sinergi multi-pihak. Mengingat hadirnya fitur pariwisata digital belum mampu mencegah meningkatnya penyebaran Covid-19. Konektivitas informasi antara penyedia jasa wisata dengan calon wisatawan dan langkah moderasi perlu diiringi kehati-hatian agar upaya mendorong kembalinya wisatawan di era new normal dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Disinilah diplomasi publik dalam pariwisata perlu digali terus-menerus guna mendapat model yang terbaik.

Sementara itu Hasbi Marwahid (2021), dalam Jurnal yang berjudul Membangun Kembali Pariwisata Yogyakarta: Strategi Dan Upaya Pemerintah Melalui Badan Tourisme (Batour) 1954-1959, menggambarkan bahwa kebijakan mengoptimalkan kelembagaan Batour yang

menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Yogyakarta yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih terstruktur. Pada perkembangan selanjutnya, pariwisata yang dikembangkan dan dijadikan pondasi yang cukup kuat dalam rangka mencari pengalaman tentang pengelolaan pariwisata di Yogyakarta secara menyeluruh.

Berkaitan dengan pengelolaan secara melembaga Niken Setyawati (2022), Yang menulis tentang Peran Dinas Pariwisata Jogjakrat, dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (2022), Menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata DIY terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan berbasis pada *community based tourism*, dan Dinas Pariwisata DIY telah melakukan perannya sebagai organisasi publik yang diberi tugas untuk melakukan perannya yaitu koordinasi, perencanaan (*planning*), Undang-undang (*legislation dan regulation*), Peran Sebagai Pengusaha (*enterpreneur*), Stimulasi (*stimulation*), Peran sebagai Pariwisata Sosial (*Social tourism*), Peran Sebagai daya tarik (*Public interest*).

Dalam menilai kesiapan pariwisata suatu daerah, salah satu cara paling mudah untuk menilainya adalah melalui 3A, yaitu Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi. Aksesibilitas dinilai dari kemudahan bagi para wisatawan untuk mencapai destinasi tujuan wisata (DTW) di suatu daerah. Selain itu, amenitas sebagai penunjang kegiatan pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesiapan amenitas yang baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi wisata. Terakhir yang tidak kalah penting adalah Atraksi. Atraksi biasanya selalu menjadi poin pertama yang mampu menarik minat wisatawan, terutama untuk DTW yang mengedepankan pesona alamnya

Perkembangan Kepariwisata Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.

Dalam menggerakkan potensi ekonomi, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang berbasis pada sektor pertanian, tetapi juga pada sektor jasa pariwisata. Potensi pariwisata yang terdapat di daerah ini terdiri dari pariwisata wisata alam pada perairan laut, wisata alam pada wilayah daratan, serta wisata budaya yang keduanya hampir tersebar merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perkembangan pariwisata terbukti mampu mendorong peningkatan usaha jasa akomodasi, restoran, serta usaha terkait lainnya. Umumnya, obyek wisata di Sulawesi Tenggara belum memenuhi 3A, akibatnya banyak potensi wisata yang indah namun belum menjadi perhatian wisatawan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.

Bertolak dari isu di atas, karena Perkembangan Kepariwisata Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja, maka dalam wawancara tidak terstruktur dengan pejabat Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengembangkan kawasan wisata baru Toronipa Kabupaten Konawe. Untuk mengembangkan kawasan wisata Toronipa sebagai kawasan wisata unggulan yang berlokasi dekat dari perkotaan, maka ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi seperti sudah dijelaskan terdahulu.

Hasil pendalam juga menjelaskan bahwa Dukungan organisasi yang bergerak di bidang usaha wisata, sangat berperan peningkatan pengelolaan. Hal ini mengandung makna bahwa dukungan

organisasi yang baik, akan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan. Kedua, dukungan organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Hal ini mengandung makna bahwa, semakin kuat dukungan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen organisasional pelaku dan pemangku kebijakan. Ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pemangku kebijakan. Hal ini mengandung makna bahwa, semakin tinggi komitmen organisasional maka kinerja juga akan semakin meningkat

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Upaya Pengembangan Potensi Wisata

No	Faktor Lingkungan Internal		Faktor Lingkungan Eksternal	
	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1	Potensi daya tarik obyek wisata cukup banyak dan beragam (budaya dan alam) di sebagian besar wilayah kabupaten/kota.	Penggalian potensi obyek wisata masih kurang.	Permintaan kunjungan wisata meningkat setiap tahunnya (Domestik dan Mancanegara).	Alih fungsi kawasan obyek wisata ke penggunaan lain.
2	Potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung obyek wisata	Kemauan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Persaingan dengan obyek daerah tujuan wisata lain
3	Adanya multiplier ekonomi yang luas dari obyek wisata.	Kerusakan pada lingkungan pada obyek wisata.	Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata	Instabilitas politik dan sosial.
4	Keragaman obyek wisata (darat dan laut, pulau-pulau).	Budaya wisata lokal masih rendah dan bersifat insidental.	Adanya upaya peningkatan SDM pengelola wisata dari pemerintah dan non pemerintah.	Perubahan iklim dan musim.
5	Keterkaitan yang kuat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat.	Terbatasnya pembiayaan pada obyek wisata.	Upaya Perlindungan kawasan wisata dan lingkungan yang semakin luas (NGO dan pemerintah).	
6		Promosi masih kurang.	Keterkaitan jaringan pengelola wisata secara nasional dan global.	

Sumber Data : Hasil Analisis Pengembangan Potensi Wisata, 2023

Dari analisis yang disebutkan diatas, dan sesuai dengan pendalaman pada Bappeda Propinsi dan Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tenggara, maka arahan program pengembangan komoditas unggulan obyek wisata alam berjumlah 4 (empat) dengan jumlah kegiatan sebanyak 11.

Rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Kawasan pada Obyek Wisata Alam, dengan kegiatan ; SID & DED Kawasan Obyek Wisata Alam; Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Obyek Wisata (Site, Loket, Kantor, Toilet, Tempat Parkir, Mushollla, Gazebo, dll); Pembangunan Infrastruktur Pendukung Obyek Wisata (permainan, air bersih, listrik, telekomunikasi). (2) Program Peningkatan Produksi, Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata Alam. Kegiatannya meliputi: Penyediaan Pusat Informasi Wisata; Pengembangan jejaring pengelola kawasan wisata; Promosi/Expo Obyek Wisata ; (3) Program Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Obyek Wisata, dengan kegiatan ; Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat; Penyediaan Pasar Produk Industri Kerajinan Rakyat; Pendidikan & Pelatihan Guide Wisatawan Kepada Masyarakat, dan (4) Program

Perlindungan Obyek Kawasan Wisata Alami, melakukan kegiatan Penyuluhan Perlindungan Lingkungan; Pemeliharaan kawasan sekitar obyek wisata alami.

Untuk obyek wisata budaya berjumlah 4 (empat) dengan jumlah kegiatan sebanyak 11, yang dirincikan dengan ; (1) Program Pengembangan Kawasan pada Obyek Wisata budaya, dengan kegiatan ; SID & DED Kawasan Obyek Wisata budaya; Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Obyek Wisata (Site, Locket, Kantor, Toilet, Tempat Parkir, Musholla, Gazebo, dll); Pembangunan Infrastruktur Pendukung Obyek Wisata (permainan, air bersih, listrik, telekomunikasi),

(2) Program Peningkatan Produksi, Promosi dan Pemasaran Obyek, dengan kegiatan ; penyediaan Pusat Informasi Wisata; Pengembangan jejaring pengelola kawasan wisata; dan Promosi/Expo Obyek Wisata. Untuk (3) Program Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Obyek Wisata, dilakukan dengan ; Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat; Penyediaan Pasar Produk Industri Kerajinan Rakyat; Pendidikan & Pelatihan Guide Wisatawan Kepada Masyarakat. Serta untuk (4) Program Perlindungan Obyek Kawasan Wisata budaya, Kegiatannya meliputi: Penyuluhan Perlindungan Lingkungan; Pemeliharaan kawasan sekitar obyek wisata budaya.

Inti dari arahan pengembangan Pariwisata adalah ; (1) Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal, (2) Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien, (3) karena Belum optimalnya pengembangan SDM, maka penekanan pada regulasi dan kelembagaan kepariwisataan, (4) Intergrasi sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan dan (5) Harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerah

D. Kesimpulan

Hasil analisis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pariwisata dilakukan masih dalam kerangka yang konvensional walaupun sudah ada kerangka perencanaan yang baik
2. Arah program pengembangan komoditas unggulan obyek wisata alam berjumlah 4 (empat) dengan jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan intinya adalah ; (1) Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal, (2) Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien, (3) karena Belum optimalnya pengembangan SDM, maka penekanan pada regulasi dan kelembagaan kepariwisataan, (4) Intergrasi sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan dan (5) Harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerah
3. Pengelola pariwisata di tingkat pelaku pengelola pariwisata masih dalam kecenderungan yang tradisional, dan belum di lihat inovasi yang signifikan berkaitan usaha pengelolaan.
4. Pengelolaan pariwisata di tingkat pemangku kebijakan masih dalam kategori melakukan karena tugas pokok dan fungsi dinas, belum muncul adanya inovasi pengelola di tingkat pemangku kebijakan.
5. Dukungan organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap usaha peningkatan pengelolaan. Hal ini mengandung makna bahwa dukungan organisasi yang baik, akan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan. Kedua, dukungan organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Hal ini mengandung makna bahwa, semakin kuat dukungan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen organisasional pelaku dan pemangku kebijakan. Ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pemangku kebijakan. Hal ini mengandung makna bahwa, semakin tinggi komitmen organisasional maka kinerja juga akan semakin meningkat

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Untuk mencapai nilai yang baik mengenai pengelolaan pariwisata, disarankan agar kerangka kerja perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan secara baik dan meningkatkan motivasi kerja pemangku kebijakan yang masih cenderung rendah.
2. Dengan adanya penghargaan atau apresiasi, maka pelaku pariwisata dapat termotivasi berkerja dan bertanggung jawab.

E. Referensi

- Adhika, I. N. R., & Riana, I. G. (2016). Pengaruh Dukungan Organisasional dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Karyawan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 857-876.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: alfabeta*.
- Arikunto. (1993). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Brahmasari, I. A., & Suprayetno, A. (2008). Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia). *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 10(2), 124-135.
- Celep, C., & Yilmazturk, O. E. (2012). The relationship among organizational trust, multidimensional organizational commitment and perceived organizational support in educational organizations. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46, 5763-5776.
- Dewi, M. P., & Rahyuda, A. G. (2015). Peran Pemeditasian Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Intention To Leave. *EJurnal Manajemen Unud*, 4(10), 2928 - 2954
- Dewi, M. P., & Rahyuda, A. G. (2015). *Peran pemediasian komitmen organisasi pada pengaruh perceived organizational support terhadap intention to leave* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Diana, S., & Frianto, A. (2021). Pengaruh Perceived Organizational Support dan Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(3), 1205-1213.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. *Journal of applied psychology*, 75(1), 51.
- Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied psychology*, 71(3), 500-507.
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara.
- Nunik R. H. (2001). *Manajemen Pelayanan Publik Daerah, Dalam Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: CLOGAPPS Universitas Diponegoro
- Suharno, E. (2010). Dasar-dasar kebijakan publik.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.